

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Asia Pasifik, terdapat banyak sekali tempat multilateral untuk melakukan interaksi pertahanan. Pertemuan tersebut berlangsung dalam bentuk pertemuan formal atau pertukaran informal, dan diprakarsai oleh ASEAN dan kekuatan eksternal. *ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM)* adalah sarana regional untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, pembicaraan pertahanan yang berpusat di ASEAN membantu meningkatkan “kesetaraan teknologi” di antara negara-negara Asia Tenggara, dengan memastikan bahwa perkembangan politik domestik dan ekonomi kemajuan menjadi saling menguatkan. Kedua, dengan bangkitnya China dan India, ADMM-Plus memungkinkan terciptanya “ruang strategis” untuk mengakomodasi kepentingan kekuatan ekstra-regional di kawasan. (Sudarsono, 2010).

Peningkatan kekuatan militer tentunya menjadi hal yang sensitif karena dapat menimbulkan dilema keamanan bagi negara lain. Adagium dilema keamanan setidaknya menegaskan dua hal. Pertama, upaya peningkatan kekuatan militer suatu negara cenderung selalu dimaknai sebagai kekuatan ofensif yang berkembang oleh negara lain, dan kedua, sulitnya membedakan antara kekuatan pertahanan dan kekuatan ofensif. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan perhitungan, salah penilaian, dan ketidakpercayaan. Peningkatan kekuatan militer suatu negara merupakan suatu keniscayaan, terlebih jika ada faktor pendorong ke arah tersebut. Artinya, peningkatan kekuatan militer negara-negara di kawasan tidak berdiri sendiri tetapi ada faktor-faktor yang menumpuk untuk bergerak ke arah tersebut. Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, kekuatan pendorongnya adalah ketegangan kawasan, sengketa perbatasan, perampasan sumber daya alam, beralihnya aktivitas militer AS ke Asia, dan meningkatnya kehadiran Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Mengingat lingkungan strategis Asia Tenggara yang berubah, terdapat kebutuhan bagi negara-negara kawasan untuk terlibat dalam masalah keamanan yang sulit secara bertahap dan dapat dikelola. ADMM telah mengambil langkah

maju dalam meningkatkan langkah-langkah pembangunan kepercayaan kawasan dengan membentuk *ASEAN Defence Industry Collaboration* (ADIC) untuk melakukan peningkatan persenjataan regional yang diharapkan dapat semakin memperdalam "defisit kepercayaan."

ADIC mulai terbentuk pada pertemuan *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) ke-4 di Ha Noi, Vietnam pada 11 Mei 2010. Tujuan dari membentuk kolaborasi kerjasama pertahanan ini merupakan upaya untuk mengurangi impor pertahanan oleh anggota ASEAN dari US \$25 miliar per tahun menjadi US \$12,5 miliar. Dan hal ini mewakili tingkat baru kerja sama keamanan di wilayah yang sangat bergantung pada impor pertahanan. (Ben-Ari, 2011) Maka dari itu tingginya tingkat kepentingan impor yang dibutuhkan ASEAN untuk memenuhi kapabilitas negara-negara di ASEAN dalam memproduksi alat pertahanan yang tidak seimbang dengan tingginya anggaran kebutuhan alat pertahanan negara-negara ASEAN. (ADIC Meeting - ADMM, 2016) Dengan demikian, fokus utama ADIC adalah meningkatkan kapasitas ASEAN pada bidang teknologi dan industri persenjataan.

Dalam kerjasama yang dilakukan ini juga menjadi pilihan tepat bagi negara-negara anggota dan diharapkan adanya timbal balik yang didapatkan, serta memberikan nilai tambah bagi ASEAN. Meskipun adanya ketidakseimbangan dalam kemampuan industri pertahanan oleh masing-masing negara. Jika melihat keuntungan yang didapat dari kolaborasi ini yaitu sektor ekonomi, hal ini dapat menghemat ekonomi militer karena semakin murah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi asset pertahanan. Selain itu juga ADIC didirikan untuk meningkatkan saling ketergantungan industri pertahanan di dalam ASEAN yang dengan demikian untuk mendorong indigenisasi dan kemandirian teknologi dalam hal produksi senjata lokal. ASEAN saat ini membeli hampir 90 persen produk dan layanan pertahanannya dari pemasok luar negeri, terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat. (Balakrishnan et.al, 2012)

Sejak ADIC dibentuk, sejauh ini ada sedikit kemajuan dalam mempromosikan kolaborasi persenjataan regional. Dan sebagian disebabkan oleh kurangnya saling melengkapi di antara industri senjata ASEAN. Beberapa

negara, seperti Singapura, memiliki industri pertahanan yang cukup canggih, tetapi sebagian besar negara-negara ASEAN lainnya memiliki kapasitas untuk memproduksi sedikit tapi persenjataan yang relatif mendasar. Selain itu, sebagian besar pemerintah dan militer ASEAN tetap curiga tentang berbagi teknologi atau melonggarkan kontrol proteksionis atas industri pertahanan nasional mereka. Dengan pertimbangan ini, negara-negara anggota memutuskan untuk tetap fleksibel, tidak mengikat, dan sukarela didalam ADIC. Akibatnya, ADIC pada dasarnya adalah entitas konsultatif, tidak memiliki kekuatan penegakan hukum, dan saat ini bahkan tidak didanai oleh Sekretariat ASEAN. (Balakrishnan et.al, 2012).

Kerjasama Regional bagi pendekatan konstruktivis sosial menekankan peran kepercayaan bersama, konvensi sosial dan praktik perilaku, dan, karenanya, tidak berfokus pada lembaga formal hanya karena banyak pendekatan rasionalis. (Börzel, 2013) Dalam hal ini konsep kerjasama regional yang diterapkan jika dikaitkan dengan ADIC dapat dilihat pada, pengaruh adanya persamaan kebutuhan dan kepercayaan yang terbangun dalam memenuhi kebutuhan persenjataan (industri pertahanan) dalam hal pengembangan, lalu doktrin militer serta struktur atau organisasi militer yang dapat mempengaruhi karakteristik apa yang akan dibangun bersama dalam hal menentukan platform persenjataan yang dibangun bersama dalam kerjasama kolaborasi industri pertahanan.

Sampai saat ini, ADIC belum bisa menentukan alat pertahanan yang akan dijadikan sebuah objek dalam tujuannya sebagai kolaborasi industri pertahanan ASEAN. Dimana hal tersebut menjadi salah satu objek penting dan hal yang mendasar dalam pengembangan kolaborasi yang akan dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ADIC mengalami perkembangan yang cukup lamban dan kurang efektif dalam berupaya di kegiatan-kegiatan yang tertulis dalam dokumen konsep ADIC. Sejauh ini ADIC hanya menjalankan *Workshop* atau pameran sebanyak 5 kali serta membentuk *consultative group of ADIC* sebanyak 2 kali. Berbanding jauh dengan poin-poin tujuan ADIC yang membangun kolaborasi teknologi bersama dalam bidang pertahanan.

Selain itu dalam pertemuan *ASEAN Defense Senior Officials Meeting* (ADSOM) di Kuala Lumpur, Malaysia pada Februari 2015, menunjukkan bahwa perkembangan ADIC yang lamban ditandai juga dengan pernyataan Indonesia yang memberikan masukan agar ADIC dapat membuat sejenis rencana kerja atau cetak biru pelaksanaan program-program ADIC ke depan. (Kemenlu RI, 2015). Hal ini lah yang menunjukkan bahwa ADIC masih belum bisa menentukan platform persenjataan yang dibutuhkan dalam Kerjasama yang dilakukan negara-negara anggota. Pengaruh yang dijelaskan jika dikaitkan dengan konsep Kerjasama regional yaitu adanya kepercayaan dalam membangun persenjataan (industri pertahanan) dalam hal pengembangan, lalu adanya kebijakan dan doktrin militer serta struktur atau organisasi militer yang terbentuk. (Khosrow-Pour, 2015)

Perkembangan industri pertahanan di kawasan Asia Tenggara masih tergolong baru dan belum semaju kawasan tetangga seperti Asia Timur dan Asia Selatan terutama di Eropa dan Amerika. Dari seluruh anggota ASEAN, hanya sedikit negara yang memiliki industri pertahanan yang mumpuni, antara lain Indonesia, dan Singapura yang memiliki teknologi senjata yang paling signifikan dibandingkan negara lain. Berdasarkan data GFP (*Global Fire Power*), negara-negara tersebut juga memiliki kekuatan militer yang mumpuni, sementara negara anggota lainnya masih membeli penuh untuk kebutuhan peralatan pertahanannya. Berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia merupakan salah satu industri pertahanan yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Ada sejumlah industri pertahanan yang bisa dibanggakan Indonesia dan mampu menghasilkan peralatan militer yang canggih dan bertenaga, meskipun tidak secanggih dan semaju produk Amerika, Rusia, dan Eropa. Indonesia sudah menghasilkan beberapa kebutuhan pertahanan dalam negeri yang juga banyak diminati oleh negara tetangga. (Shiddiqy, 2019) Dapat terlihat bahwa negara-negara Asia Tenggara mulai secara agresif meningkatkan anggaran dan kemampuan pertahanan militernya melalui pengembangan industri pertahanan dalam negeri, khususnya Indonesia. PT. Pindad sebagai salah satu industri pertahanan dalam negeri yang mampu memproduksi sebagian

besar kebutuhan peralatan pertahanan untuk pertahanan darat seperti: *Light and Heavyr*

ifle, Rudal dan Mortir, Amunisi dan Roket, serta kendaraan taktis dan tempur seperti Panzer dan Tank. Terbaru, Roda rantai *Tiger Tank Medium* telah mendukung kebutuhan TNI dan Polri serta untuk Niaga.

Kapabilitas industri pertahanan dalam negeri Indonesia saat ini berada pada level teknologi menengah. Artinya, industri pertahanan Indonesia sudah disuplai dan digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Misalnya, peralatan pertahanan darat yang dibuat oleh PT.Pindad, mulai dari pistol dan senjata serbu hingga mortir dan kendaraan tempur roda ban (Panzer Anoa) sudah mendukung kebutuhan TNI Angkatan Darat. Dalam hal peralatan pertahanan udara, PT. Dirgantara Indonesia saat ini sedang mengembangkan kerja sama produksi dengan Airbus Military untuk membangun pesawat angkut berukuran sedang C-212, CN-235, dan CN-295 yang memiliki 50 parasut. Hal yang sama berlaku untuk pembuatan helikopter serbu Bell-412 dan helikopter Cougar-725. Di sisi *marine defence equipment*, PT. PAL diandalkan untuk pembangunan kapal perang berskala besar, seperti korvet kelas dan kapal selam. PT. PAL juga didorong untuk membuat kapal perang untuk kapal tanker. Industri pertahanan swasta berkontribusi besar pada kapal patroli cepat berukuran 60 meter ke bawah, seperti Palindo dan Lundin. Dari kemampuan yang dimiliki Indonesia, seharusnya mampu dimanfaatkan dengan baik dalam kerjasama kolaborasi pertahanan di ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Didalam tujuan kerjasama ADIC ditemukan adanya visi kolaborasi teknologi senjata yang sampai saat ini belum terealisasi, dan hanya menjalankan promosi serta pameran pertahanan yang saat ini dilaksanakan sebanyak 5 kali, serta membentuk *consultative group* sebanyak 2 kali. Indonesia sendiri banyak memberikan masukan agar ADIC dapat membentuk rencana kerja yang akan dilakukan ADIC kedepannya di awal pembentukan saat itu.

Dengan demikian kolaborasi yang dilakukan ini hanya akan dijadikan pertemuan yang tidak sepenuhnya efektif dan kurang menghasilkan keuntungan bagi negara-negara anggota khususnya Indonesia. Sehingga dari kasus ini dapat dirumuskan pertanyaan rumusan masalah menjadi : **Bagaimana implementasi kerjasama pertahanan Indonesia terhadap ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) pada tahun 2016 – 2019?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan melalui kerangka Kerjasama Pertahanan Asia Tenggara dalam ADIC dengan menelaah implementasinya di Indonesia. Tujuan lain dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Menelusuri negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN terhadap ADIC dalam mengembangkan gagasan Kerjasama Regional dengan sistem kegiatan-kegiatan sesuai dengan dokumen konsep ADIC.
- 1.3.2 Menjelaskan yang telah dilakukan negara Indonesia dalam upaya yang dilakukan dalam menanggapi kerjasama ADIC khususnya di dalam implementasi pertahanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan :

1. Secara akademis penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai Implementasi kerjasama pertahanan Indonesia terhadap ASEAN *Defense Industry Collaboration* (ADIC). Sekaligus memperkaya kajian keamanan dan pertahanan dalam studi hubungan internasional.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap keilmuan pengkajian strategis dan pertahanan internasional mengenai bagaimana suatu kawasan yang mayoritas anggotanya merupakan negara-negara berkembang membangun kekuatan melalui kolaborasi industri pertahanan, yang bisa mempengaruhi kawasan dan global.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi pembahasan tentang *literature review* bersamaan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Peneliti melalui studi literatur mencari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang penulis ambil. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan teori dan konsep yang mampu membedah topik permasalahan penelitian yang diambil. Selain itu peneliti juga menambahkan alur pemikiran dan asumsi dasar pada bab ini.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan peneliti guna memaksimalkan hasil akhir penelitian. Selain metode penelitian, penulis juga menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

BAB IV. *ASEAN DEFENSE INDUSTRY COLLABORATION (ADIC)*

Bab ini membahas tentang *overview* dibentuknya ADIC di dalam ADMM sebagai potensi kemajuan teknologi industri pertahanan dinegara ASEAN, khususnya dalam mengurangi belanja militer.

BAB V. IMPLEMENTASI KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP *ASEAN DEFENSE INDUSTRY COLLABORATION (ADIC)*

Pada bab ini Penulis berupaya untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Penelitian akan fokus membahas implementasi pertahanan negara

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN terhadap kerangka ADIC. Disisi lain bab ini membahas pula mengenai hambatan dalam implementasi Kerjasama ADIC.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang bagaimana penulis dapat mengerti dan memahami tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan penelitian yang berupa Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang sumber-sumber referensi penulis dalam melengkapi data yang digunakan selama pelaksanaan dan penyusunan penelitian.

LAMPIRAN

Lampiran berisi tentang media gambar dan beberapa hal yang mendukung dalam kelengkapan berkas dan data dari hasil penelitian. Seperti lembar Sertifikat sebagai syarat kelulusan, lembar penilaian, lembar hasil TOEFL, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama penelitian dilaksanakan.